

# PROVINSI RIAU



## RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

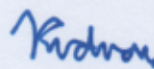
## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh seluruh pejabat struktural.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2018 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

Tentu saja penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.SI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650904 199703 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Gambaran Umum .....</b>	<b>2</b>
B.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau .....	2
B.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau .....	6
B.3. Keadaan Pegawai .....	7
<b>C. Landasan Hukum.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III : RENCANA KINERJA TAHUNAN.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Program dan Kegiatan.....</b>	<b>11</b>
<b>B. Alokasi Anggaran.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV. : PENUTUP .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>15</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>15</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.2.	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2018 Berdasarkan Golongan .....	6
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator BKD Tahun 2018 .....	10
Tabel 3.1.	Alokasi Keuangan BKD Provinsi Riau Tahun 2018.....	14

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan bagian dari Organisasi Pemerintahan Daerah yang mempunyai peran sebagai pembina dan pengembang Sumber Daya Aparatur Daerah Riau. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Riau Tahun 2018, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antar pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BKD Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatannya.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2018 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

RKT ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di masa yang akan datang.

## **B. Gambaran Umum**

### **B. 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Riau**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4). Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

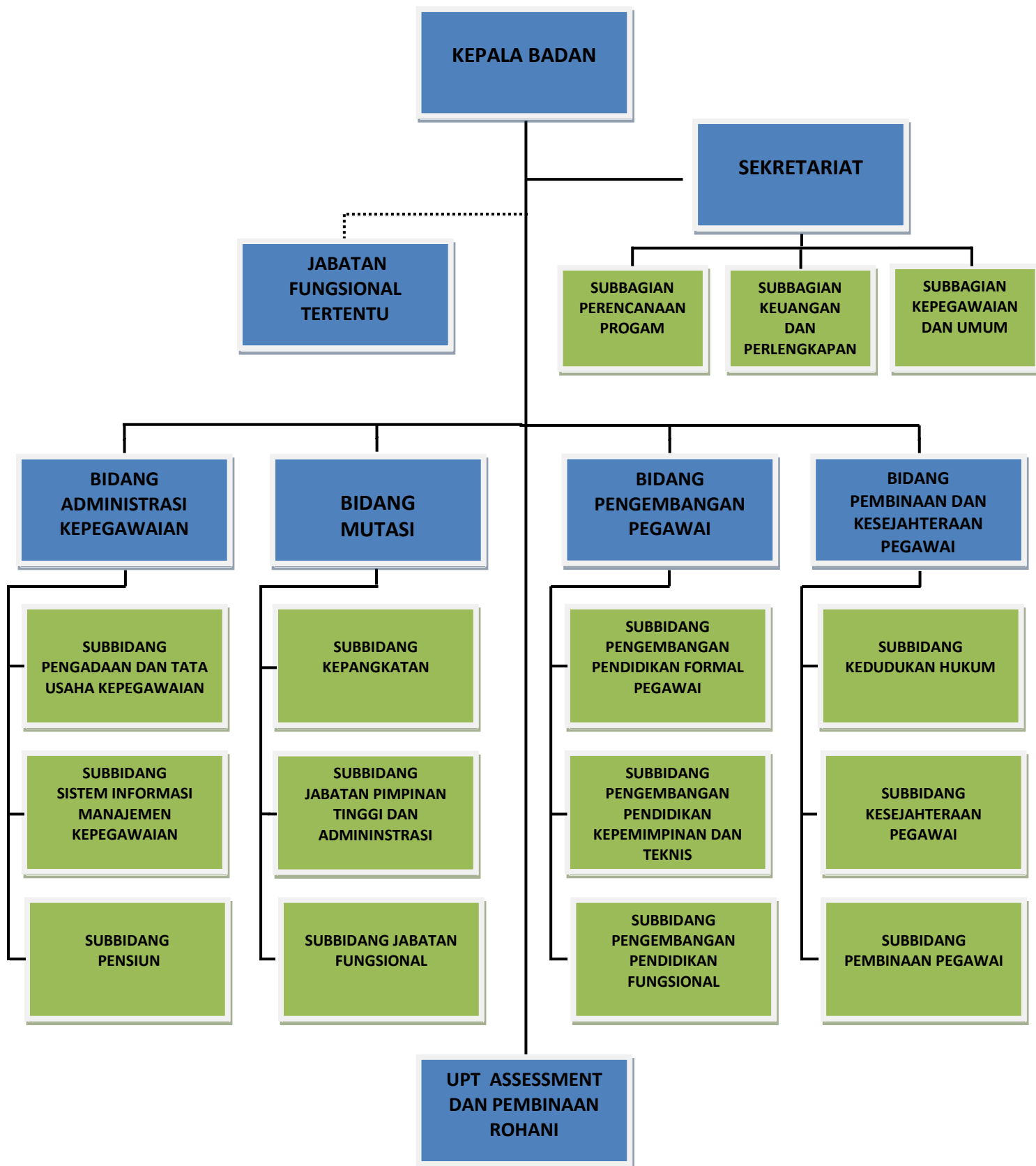
- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan Program;
  2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas:
  1. Subbidang Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian;
  2. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
  3. Subbidang Pensiun.
- d. Bidang Mutasi, terdiri atas:
  1. Subbidang Kepangkatan;
  2. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; dan
  3. Subbidang Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas:
  1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
  2. Subbidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan Teknis;  
dan
  3. Subbidang Pengembangan Pendidikan Fungsional.
- f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
  1. Subbidang Kedudukan Hukum;
  2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai; dan
  3. Subbidang Pembinaan Pegawai.

- g. UPT Asement dan Pembinaan Rohani :
  - 1. Seksi Tata Usaha Asement dan Pembinaan Rohani;
  - 2. Seksi Asement; dan
  - 3. Seksi Pembinaan dan Rohani.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

## Struktur Organisasi





## **B. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa BKD Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Tugas**

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKD Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### B. 3. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31 Januari 2018 sebanyak 125 orang dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2018  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
67	58	125

Dari data berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat bahwasanya jenis kelamin laki-laki sebanyak 67 orang (53,34%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang (46,66%). Dari jumlah tersebut maka ditampilkan data berdasarkan golongan sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2018  
Berdasarkan Golongan**

Ket	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV
Jumlah	1	13	94	17
<b>Total</b>	<b>125</b>			

Sedangkan data berdasarkan golongan terdapat jumlah pegawai golongan I sebanyak 1 orang, sedangkan untuk golongan II sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 94 orang dan golongan IV sebanyak 17 orang.

### **C. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4 );
17. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana kerja yang menjadi target pencapaian tahun 2018 sehingga dapat menjadi instansi yang akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan Daerah Provinsi Riau tahun 2018 adalah dapat mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah dan sebagai perwujudan salah satu kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan manfaat antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah provinsi Riau,
- b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah Badan Kepegawaian Daerah provinsi Riau,
- c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau dimasa yang akan datang,
- d. Meningkatkan Kredibilitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dimata instansi pemerintah lainnya,
- e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Riau.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Riau yang diturunkan melalui tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2018

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	9
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	1.1. Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya	2%
		2. Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara	2.1. Presentase Penetapan ASN dalam jabatan	10%
		3. Meningkatnya disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara	3.1. Persentase menurunnya pelanggaran disiplin	35%
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	4.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	B

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, maka pada tahun 2018 Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan dapat tergambar sebagai berikut:

#### **A. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKD Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada tahun anggaran 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melaksanakan 9 (sembilan) program dan 67 ( enam puluh tujuh ) kegiatan terdiri dari:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan jasa keamanan kantor
13. Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo)

#### **II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pembinaan fisik dan mental aparatur
2. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
3. Pemantauan disiplin PNS
4. Penanganan Kasus-kasus kepegawaian
5. Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN
6. Konsultasi dan bantuan hukum

### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

### **V. Program Pendidikan Kedinasan**

1. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)
3. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
4. Penunjang pendidikan ikatan dinas
5. Beasiswa tugas belajar Aparatur luar negeri

### **VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau
3. Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI
4. Persemayaman dan pemakaman anggota korpri yang meninggal

### **VII. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur**

1. Satya Lencana Karya Satya
2. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspem PNS se Provinsi Riau
3. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD
4. Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti
5. Monitoring IPDN
6. Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pns provinsi riau
7. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011
8. Pengadaan Aparatur Sipil Negara



9. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
10. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)
11. Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI
12. MTQ nasional korpri
13. Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan
14. Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau
15. Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau
16. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau
17. Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
18. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

#### **VIII. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara**

1. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS
2. Pengelolaan Pensiun PNS
3. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau
4. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu
5. Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur Pelayanan Publik
6. Pengelolaan Administrasi kepegawaian
7. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau
8. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
9. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
10. Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

11. Penyelenggaraan verifikasi usulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau
12. Pengelolaan administrasi penggunaan gelar PNS pemerintah Provinsi Riau
13. Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
14. Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
15. Sistem aplikasi penatausahaan bkd provinsi riau

#### **IX. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur**

1. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS
2. Penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur sipil Negara provinsi riau

#### **B. Alokasi Anggaran**

Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja tidak langsung (BTL) adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan ( Gaji Pegawai ) dan sedangkan Belanja langsung (BL) belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang sifatnya untuk mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat tergambar dalam table berikut ini :

**Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKD Provinsi Riau Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 17.465.360.841	36,2%
2	Belanja Langsung	Rp. 30.809.619.106	63,8%
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 48.274.979.947</b>	<b>100 %</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2018 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

#### **B. Saran**

Saran merupakan suatu masukan atau anjuran yang bersifat baik dan membangun oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur dan masyarakat.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau maupun dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.

3. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Riau dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan BKD Provinsi Riau. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Formulir  
DPA-SKPD 2.2**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>( 3.00. ) - PENUNJANG URUSAN</b>										
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	320 Surat	APBD,	5.900.000,00	6.600.000,00	7.102.000,00	3.915.000,00	23.517.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	12 bulan	APBD,	590.310.000,00	405.430.000,00	170.195.000,00	80.310.000,00	1.246.245.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	17 Unit	APBD,	759.970.525,00	1.946.225,00	1.946.225,00	1.946.225,00	765.809.200,00
	006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	14 Unit	APBD,	47.350.700,00	47.350.700,00	47.350.700,00	47.350.700,00	189.402.800,00
	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	12 Bulan	APBD,	192.060.000,00	159.860.000,00	171.960.000,00	168.694.000,00	692.574.000,00
	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	12 Bulan	APBD,	28.523.150,00	28.523.150,00	28.523.150,00	28.523.150,00	114.092.600,00
	011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	12 Bulan	APBD,	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00
	012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	899 Unit	APBD,	21.898.900,00	21.508.300,00	21.087.000,00	10.491.020,00	74.985.220,00
	015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	12 Bulan	APBD,	32.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	17.000.000,00	100.000.000,00
	017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pekanbaru	4.620 Porsi	APBD,	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	149.600.000,00
	018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten dan Luar Daerah	100 kali	APBD,	122.188.500,00	282.571.200,00	202.379.850,00	202.379.850,00	809.519.400,00
	019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	23 Orang	APBD,	170.420.000,00	163.200.000,00	163.200.000,00	152.000.000,00	648.820.000,00
	116.	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Pekanbaru	1 Kali	APBD,	-	-	110.000.000,00	-	110.000.000,00
<b>02.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	2 Unit	APBD,	263.664.500,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	342.864.500,00
	028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	189 Unit	APBD,	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	70.000.000,00
	030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	526 Unit	APBD,	69.550.000,00	49.150.000,00	49.150.000,00	49.150.000,00	217.000.000,00
<b>03.</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>								
	006.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Pekanbaru	135 Orang	APBD,	13.185.700,00	26.088.000,00	11.016.000,00	2.200.000,00	52.489.700,00
	012.	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Pekanbaru	0	APBD,	-	-	-	-	-
	013.	Pemantauan disiplin PNS	Pekanbaru	20%	APBD,	9.179.400,00	43.322.900,00	13.200.000,00	4.750.000,00	70.452.300,00
	014.	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Pekanbaru	80%	APBD,	12.408.200,00	46.434.200,00	39.395.600,00	-	98.238.000,00
	016.	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Pekanbaru	48 Orang	APBD,	22.588.300,00	18.500.000,00	22.900.000,00	200,00	63.988.500,00
	037.	Konsultasi dan Bantuan Hukum	Provinsi dan Kabupaten/Kota	60%	APBD,	86.770.000,00	65.787.500,00	16.695.400,00	6.310.000,00	175.562.900,00
<b>05.</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
	026.	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	44 Orang	APBD,	181.120.000,00	170.000.000,00	117.592.400,00	79.107.800,00	547.820.200,00
<b>( 3.00.03. ) - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>										
<b>15.</b>		<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Luar Daerah	45 Orang	APBD,	988.659.750,00	1.448.358.500,00	2.317.285.450,00	469.526.100,00	5.223.829.800,00
	009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Luar Daerah	1 Orang	APBD,	15.080.200,00	43.435.000,00	15.622.400,00	-	74.137.600,00
	010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Luar Daerah	10 Orang	APBD,	30.175.600,00	406.029.200,00	311.114.700,00	158.321.200,00	905.640.700,00
	016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Luar Daerah	25 Orang	APBD,	94.397.400,00	172.300.000,00	333.964.020,00	46.046.000,00	646.707.420,00
	017.	Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri	Luar Negeri	19 Orang	APBD,	75.795.100,00	803.406.000,00	59.945.000,00	3.214.684.800,00	4.153.830.900,00
<b>16.</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>								
	030.	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Pekanbaru	143 Orang	APBD,	-	147.310.300,00	-	3.645.500,00	150.955.800,00
	061.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau	Pekanbaru	23 Orang	APBD,	157.099.300,00	123.421.200,00	87.627.500,00	21.802.500,00	389.950.500,00
	072.	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Pekanbaru	1 Kegiatan	APBD,	-	-	-	61.357.000,00	61.357.000,00
	073.	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Pekanbaru	100 %	APBD,	33.057.100,00	15.000.000,00	30.000.000,00	-	78.057.100,00
<b>17.</b>		<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur</b>								
	031.	Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	500 Orang	APBD,	44.436.200,00	26.133.000,00	33.478.800,00	49.378.200,00	153.426.200,00
	035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	75 Orang	APBD,	22.935.000,00	40.234.100,00	-	-	63.169.100,00
	047.	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD	Pekanbaru	12 orang	APBD,	126.125.400,00	6.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	144.125.400,00
	056.	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	Luar Daerah	20 Orang	APBD,	21.768.000,00	527.600,00	606.328.200,00	-	628.623.800,00
	057.	Monitoring IPDN	8 Kampus Regional 1 Kampus Pusat	126 Praja IPDN	APBD,	5.547.500,00	5.100.000,00	89.638.100,00	144.599.400,00	244.885.000,00
	060.	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	120 Orang	APBD,	12.847.700,00	56.514.500,00	16.043.000,00	-	85.405.200,00
	066.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	12 Kabupaten/kota	360 Orang	APBD,	55.519.600,00	55.039.400,00	-	(5.241.000,00)	105.318.000,00
	068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	250 Orang	APBD,	-	21.768.000,00	849.735.900,00	-	871.503.900,00
	070.	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pekanbaru dan Kabupaten	400 Orang	APBD,	28.895.500,00	150.935.600,00	13.212.500,00	26.566.000,00	219.609.600,00
	075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Pekanbaru	6000 Dokumen elektronik	APBD,	111.606.900,00	100.903.800,00	69.915.400,00	7.500.000,00	289.926.100,00
	098.	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Pekanbaru	200 Orang	APBD,	-	-	125.000.000,00	-	125.000.000,00
	100.	MTQ Nasional KORPRI	Luar daerah	120 orang MTQ provinsi/10 orang MTQ nasional	APBD,	138.600.000,00	536.390.800,00	3.600.000,00	3.600.000,00	682.190.800,00
	109.	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	12 Kabupaten/kota	1 Dokumen	APBD,	23.100.000,00	86.907.200,00	58.367.800,00	23.100.000,00	191.475.000,00
	114.	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Sistem	APBD,	3.335.404.958,00	238.206.400,00	229.430.600,00	195.056.900,00	3.998.098.858,00
	116.	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau	Pekanbaru	0	APBD,	-	-	-	-	-
	117.	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Pekanbaru	50 Jabatan	APBD,	87.971.600,00	82.752.500,00	19.300.000,00	10.200.000,00	200.224.100,00
	120.	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Kabupaten/kota	12 Seleksi JPT	APBD,	33.751.100,00	37.912.000,00	22.270.000,00	45.092.900,00	139.026.000,00
	127.	Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	1000 orang	APBD,	5.244.000,00	78.292.000,00	81.092.000,00	-	164.628.000,00
<b>18.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara</b>								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	001.	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Pekanbaru dan Kabupaten Kota se Provinsi Riau	1500 Orang	APBD,	129.804.200,00	122.179.000,00	272.781.900,00	59.483.800,00	584.248.900,00
	002.	Pengelolaan Pensiun PNS	Pekanbaru	400 Orang	APBD,	56.100.000,00	43.766.600,00	74.887.800,00	10.245.600,00	185.000.000,00
	006.	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pekanbaru	4.000 Orang	APBD,	103.995.000,00	37.512.000,00	66.437.000,00	31.640.000,00	239.584.000,00
	008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Pekanbaru	1.000 Orang	APBD,	57.895.000,00	62.386.400,00	106.370.000,00	7.350.000,00	234.001.400,00
	009.	Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik	Pekanbaru	1 Dokumen	APBD,	201.595.400,00	60.300.000,00	60.300.000,00	60.300.000,00	382.495.400,00
	011.	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Pekanbaru	300 Berkas Administrasi Kepegawaian	APBD,	131.111.110,00	14.000.000,00	89.875.000,00	2.000.000,00	236.986.110,00
	013.	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Pekanbaru dan Kabupaten	500 Formasi PNS	APBD,	134.830.600,00	83.485.200,00	25.682.600,00	-	243.998.400,00
	017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	500 Orang	APBD,	230.779.600,00	236.480.900,00	105.442.500,00	90.646.800,00	663.349.800,00
	020.	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau	Pekanbaru	500 Orang	APBD,	-	19.569.900,00	-	-	19.569.900,00
	023.	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pekanbaru	0	APBD,	-	-	-	-	-
	025.	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Propinsi Riau	Pekanbaru	4000 Orang	APBD,	190.001.000,00	-	184.815.000,00	-	374.816.000,00
	026.	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru dan Jakarta	50 Surat Keterangan	APBD,	4.503.000,00	17.893.000,00	19.393.000,00	550.000,00	42.339.000,00
	027.	Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	12 Bulan	APBD,	54.615.000,00	31.795.000,00	31.795.000,00	31.795.000,00	150.000.000,00
	028.	Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	70 Berita	APBD,	-	2.930.300,00	47.963.598,00	750.000,00	51.643.898,00
	029.	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Aplikasi	APBD,	15.660.000,00	82.420.000,00	21.260.000,00	15.660.000,00	135.000.000,00
<b>19.</b>		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur</b>								
	002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Pekanbaru	200 Orang	APBD,	122.165.000,00	-	122.457.800,00	-	244.622.800,00
	006.	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Pekanbaru	16.800 orang	APBD,	9.500.000,00	70.815.700,00	181.893.000,00	5.671.600,00	267.880.300,00
						<b>9.792.060.693,00</b>	<b>7.228.983.275,00</b>	<b>8.075.318.893,00</b>	<b>5.713.256.245,00</b>	<b>30.809.619.106,00</b>

Mengesahkan,  
**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**SYAHRAL ABDI, AP, M.Si.**  
NIP. 19751001 199503 1 001

Pekanbaru, 02 Januari 2018

**Pengguna Anggaran**

**IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si**  
NIP : 19650904 199703 1 001